



EVALUASI KINERJA KELURAHAN PADA BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

(Studi di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia)

SKRIPSI

Oleh :

DIKEHENDAKI HALUANA'A

NPM : 10.851.0059

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **EVALUASI KINERJA KELURAHAN PADA BIDANG
SOSIAL KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN
DWIKORA KECAMATAN MEDAN HELVETIA**

Nama : Dikehendaki Haluana'a
NPM : 10.851.0059
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Drs Usman Tarigan M.Si

Pembimbing I


Ismail Fahmi SH, S.Pd, M.Si

Pembimbing II


Drs. Anni Purba, MA.Ph.D
Dekan

ABSTRAK

EVALUASI KINERJA KELURAHAN PADA BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN DWIKORA KECAMATAN MEDAN HELVETIA

OLEH :

DIKEHENDAKI HALUANA'A

NPM : 10.851.0059

PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

Masyarakat Indonesia terus melakukan berbagai program untuk mendapatkan pelayanan dari aparaturnya negara untuk mendapat kesejahteraan sosial masyarakat namun, keberhasilannya belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan taraf hidup dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memperkuat perekonomian daerah dalam memperkuat perekonomian nasional menuju kemakmuran dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Demikian halnya dengan Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia sangat diharapkan adanya kemampuan Lurah untuk mengevaluasi kinerja kelurahan pada bidang sosial kemasyarakatan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih sejahtera dari pelayanan aparaturnya tersebut. Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang No.73 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Kelurahan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia

Rumusan Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan evaluasi kinerja kelurahan pada bidang sosial kemasyarakatan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pelayanan pada bidang sosial kemasyarakatan di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi kinerja pada bidang sosial kemasyarakatan di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia.

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang berusaha untuk menggambarkan permasalahan, menafsirkan, merumuskan serta keterangan-keterangan yang diperoleh sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh kepala keluarga di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia berjumlah 4.278 (KK) Sampel terdiri dari 98 respon yang menggunakan teknik penarikan sampel berdasarkan rumus Taro Yamane.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Evaluasi Kinerja Lurah Pada Bidang Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia telah melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin dengan melihat kelayakan tempat tinggal, sumber penghasilan, kualitas pendidikan dan dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta membantu masyarakat dalam pengurusan e-KTP, KK, dan surat tanah dan lain sebagainya.

**Kata Kunci : Kinerja Kelurahan, Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Kemasyarakatan, di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan
Helvetia**

ABSTRACT

PERFORMANCE EVALUATION IN TERMS OF SOCIAL COMMUNITY VILLAGES IN DISTRICT DWIKORA SUB FIELD HELVETIA

BY:

DIKEHENDAKI HALUANA'A

NPM : 10.851.0059

STUDY PROGRAMS : GOVERNMENT KNOWLEDGE

Indonesia continues to perform a variety of community programs for the service of the state apparatus to receive social welfare , however, success has not been able to improve the welfare of society and the improvement of living standards with the needs of society . To strengthen the region's economy in memperkokoh national economy to prosperity and social well-being of society .

Such is the case with the District Sub Dwikora Helvetia Medan is expected to include the ability to evaluate the performance of kelurahan Trench in the field of social community for social well-being of a more prosperous than the ministry of the apparatus . Indonesian government to make the Law No. 73 of 2005 on Government Regulation villages to bless the people of Indonesia

Problem solutions are discussed in this study is how the implementation of the performance evaluation kelurahan in the field of community and social factors that influence what level of service in the field of social community in the District Sub Dwikora Helvetia Medan . The purpose of this study was to analyze the performance evaluation in the field of social community in the District Sub Dwikora Medan Helvetia .

Method in her research is descriptive quantitative attempt to describe the problem , interpret , summarize and explanations obtained as is . In this study is that as the population of the entire head of the family in the District Sub Medan Helvetia Dwikora of 4278 (KK) The sample consisted of 98 responses using drawing techniques sapel based Taro Yamane formula .

The results clarify that the Performance Evaluation Trenches In Social Areas in the District Social Dwikora Sub Medan Helvetia has been performing his duties as fully as possible to see the qualifications of residence, source of income , education and the fulfillment kualitas basic needs of the community and help the community in the management of e - KTP , KK , and letters of land and so forth.

**Keywords : Performance District, Social Wellbeing Improvement
Community, in the subdistrict of Medan Helvetia District Dwikora**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Kinerja Kelurahan Pada Bidang Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia”**

Skripsi ini diajukan sebagai persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Drs Usman Tarigan M.Si selaku pembimbing I dan Ismail Fahmi SH, S.Pd, M.Si selaku pembimbing II serta Ibu Beby Masitho Batubara S.Sos, MAP selaku sekretaris, Bapak/Ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Isipol UMA dan terlebih-lebih kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan dorongan moril maupun materil dalam membuat skripsi ini dan juga kepada teman-teman Mahasiswa Fisipol UMA, Forkamnis UMA dan teristimewa kepada istri tercinta saya yang sudah membantu saya dalam membuat skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dari berbagai pihak yang turut mendukung penulis hingga Skripsi usulan ini selesai.

Medan, 26 Januari 2015

Penulis



Dikehendaki Haluana'a



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Perumusan Masalah	8
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.5.1. Tujuan Penelitian	9
1.5.2. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1. Uraian Teori	11
2.1.1. Pengertian Evaluasi	11
2.1.2. Pengertian Kinerja	11
2.1.3. Pengertian Evaluasi Kinerja	12
2.1.4. Metode Evaluasi Kinerja	14
2.1.5. Tujuan Evaluasi Kinerja	15
2.1.6. Faktor- faktor Evaluasi Kinerja	17
2.1.7. Sistem Evaluasi Kinerja yang Efektif	18
2.1.8. Pengertian Kelurahan	20

2.1.9. Proses Evaluasi Kinerja Kelurahan	24
2.2. Kerangka Pemikiran	25
2.3. Hipotesis	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1. Populasi dan Sampel	28
3.2. Teknik Pengumpulan Data	32
3.3. Defenisi Operasional Variabel	33
3.4. Analisis Data	35
BAB IV PEMBAHASAN	37
4.1. Sejarah terbentuknya Kelurahan Dwikora	37
4.2. Keadaan Demografi	38
4.3. Keadaan Sosial dan Ekonomi	38
4.4. Struktur Organisasi Kelurahan Dwikora	41
4.5. Visi dan Misi Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia.	42
4.6. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan	42
4.7. Responden Usia, Jenis kelamin, Pendidikan dan Pekerjaan	55
4.8. Informasi Tentang Jawaban Responden	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Populasi jumlah penduduk di setiap lingkungan	
Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia	28
Tabel 1.2 : Populasi Jumlah Penduduk Di Setiap Lingkungan	
Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia	32
Bagan 1.1 : Struktur organisasi pemerintah Kelurahan Dwikora	41
Tabel 1.3 : Berdasarkan Usia	55
Tabel 1.4 : Berdasarkan jenis kelamin	56
Tabel 1.5 : Berdasarkan Tingkat Pendidikan	56
Tabel 1.6 : Berdasarkan jenis pekerjaan	57
Tabel 1.7 : Tentang kepemimpinan Lurah menurut responden	58
Tabel 1.8 : Tentang delegasi Lurah telah mentaati aturan pemerintahan di Kelurahan Dwikora	58
Taba 1.9 : Tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Lurah	59
Tabel 1.10 : Tentang pelayanan yang baik yang dilakukan Lurah kepada masyarakat	59
Tabel 1.11 : Tentang pembuatan pos siskamling untuk penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum dilingkungan masing-masing	60
Tabel 1.12 : Tentang pemberian tugas kebersihan wilayah yang diberi oleh Lurah di kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia	60
Tabel 1.13 : Tentang pemeliharaan sarana prasarana untuk pelayanan masyarakat untuk masyarakat umum yang diberi oleh Lurah	61
Tabel 1.14 : Tentang pembinaan lembaga swadaya masyarakat	62

Tabel 1.15 : Tentang pengembangan potensi yang dimiliki untuk sosial kemasyarakatan	62
Tabel 1.16 : Tentang penglibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi Kelurahan	63
Tabel 1.17 : Tentang kesejahteraan sosial masyarakat	63
Tabel 1.18 : Tentang kinerja kelurahan pada bidang sosial kemasyarakatan	64
Tabel 1.19 : Tentang peran seorang lurah untuk kemajuan kelurahan yang di pimpinnya di kelurahan Dwikora	64
Tabel 1.20 : Tentang pelaksanaan tugas Lurah pada bidang sosial kemasyarakatan	65
Tabel 1.21 : Tentang fasilitas sarana dan prasarana yang sudah memadai di Kelurahan Dwikora	65
Tabel 1.22 : Tentang pembagian Raskin dan pengurusan BLSM kepada masyarakat Dwikora	66
Tabel 1.23 : Tentang keterlibatan masyarakat setempat untuk berpartisipasi di dalam proses pembangunan	66
Tabel 1.24 : Manfaat pembangunan di kelurahan Dwikora	67
Tabel 1.25 : Tentang Kelayakan tempat tinggal masyarakat	67
Tabel 1.26 : Tentang pemberian perhatian terhadap kegiatan sosial yang dilakukan oleh warga Dwikora	68
Tabel 1.27 : Tentang kegiatan yang diberikan Lurah kepada masyarakat Kelurahan Dwikora	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. dalam penyelenggara pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. perangkat daerah kabupaten / Kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah. Lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Selain dari pada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan diperkotaan, perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembentukan kelurahan harus mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis dan syarat kewilayahannya.

Peraturan Daerah No. 72 Tahun 2005 ayat (1) tentang perubahan status desa dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Dalam Peraturan daerah No. 72 Pasal 5 ayat (1) tentang kedudukan dan tugas yaitu :

1. Luas wilayah
2. Jumlah penduduk
3. Prasarana dan sarana penduduk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

4. Potensi ekonomi
5. Kondisi sosial budaya masyarakat

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Pasal 2 ayat (1) adalah Kelurahan dibentuk diwilayah kecamatan, dan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersanding, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. Dalam undang-undang ini pembentukan kelurahan mempunyai persyaratan seperti

1. Jumlah penduduk
2. Luas wilayah
3. Bagian wilayah kerja
4. Sarana dan prasarana pemerintah

Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih pada pasal 2 ayat (2) tentang Pembentukan Kelurahan dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggara pemerintah kelurahan. Kelurahan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan evaluasi kinerja kelurahan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai fungsi kelurahan sebagai instansi pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 pada Pasal 9 ayat (1) tentang keuangan kelurahan bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya,
2. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten / Kota pihak ketiga
3. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pihak ketiga yaitu pihak swasta, perbankan lembaga swadaya dan perguruan tinggi. Anggaran itu sendiri meliputi proses secara penyusunan, pengesahan, pelaksana dan pertanggung jawaban. Anggaran harus transparan kepada masyarakat.

Pada Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 dalam pasal 9 ayat (2) tentang keuangan kelurahan yaitu Alokasi anggaran kelurahan berasal dari APBD Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor sekurang-kurangnya adalah :

1. Jumlah penduduk
2. Kepadatan penduduk
3. Luas wilayah
4. Kondisi geografis / karakteristik wilayah
5. Jenis dan volume pelayanan, dan
6. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 2005 pasal 3 ayat (1), tentang kedudukan dan tugas adalah lurah melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati / Walikota melalui Camat.

Kelurahan dipimpin oleh lurah dan didampingi oleh perangkat kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati / Walikota, selain dari pada itu lurah mempunyai tugas adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat

3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pada hakekatnya, anggaran daerah merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengabilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standart untuk evaluasi kinerja. Alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas atau preferensi daerah.

Norma dan prinsip anggaran tersebut adalah :

1. Transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bertanggung jawab, dimana diperlukan syarat transparansi dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah. Anggaran daerah merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja dan bertanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sarana, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Semua alokasi dana yang diperoleh dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. Disiplin anggaran

Anggaran yang disusun harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tidak boleh mengesampingkan keseimbangan antara pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

3. Efisiensi dan efektivitas anggaran

Alokasi dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, disusun berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang berkualitas bagi masyarakat.

4. Keadilan anggaran

Adalah penggunaan anggaran secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah adil secara gender.

Alat ukur dari kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi adalah :

1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku didalam masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan
2. Menjaga kebutuhan-kebutuhan masyarakat
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial yang artinya sistem pengawasan dari pada masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Kesejahteraan dinilai dalam satuan waktu, kesejahteraan waktu adalah berapa lama anda bisa hidup seperti biasa tanpa bekerja dengan apa yang anda

punya sekarang dan apa yang akan datang kemudian (*passive income*). Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya dengan serta alam lingkungan disekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan dan manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat.

Disamping itu untuk mencapai tujuan secara mengevaluasi kinerja kelurahan yaitu mengetahui tugas pokok, fungsi, dan kewajiban adalah dengan cara melaksanakan kegiatan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat, penyaluran aspirasi masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dan yang terutama adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul : ***“Evaluasi Kinerja Kelurahan Pada Bidang Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia”***

1.2. Identifikasi Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa kelurahan sebagai sub sistem Kabupaten / Kota merupakan pelaksana pemeliharaan, pembangunan dan kemasyarakatan yang paling dekat bersentuhan dengan rakyat. Proses pembangunan kelurahan secara umum merupakan pembangunan komprehensif dan partisipatif. Dengan pembentukan lembaga kemasyarakatan kegiatan yang dilaksanakan dan mampu memberdayakan masyarakat sehingga diharapkan masyarakat Kelurahan Dwikora

mampu mengidentifikasi dan menginventaris permasalahan dan kebutuhan masyarakatnya, merencanakan kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan efektif dan efisien.

Dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat kelurahan akan menjadi unsur pemerintah yang berperan paling mendasar dalam memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan sebaiknya menjadi fasilitator program-program pemerintah yang menjadi jawaban atas kebutuhan-kebutuhan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya.

Dalam hal ini proses evaluasi kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diterapkan Lurah di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia terhadap masyarakat yang ada dilingkungan kantor tersebut. Maka perlu dilakukan identifikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Pasal 5 ayat (1) tentang kedudukan dan tugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lurah sebagai berikut :

1. Medan Helvatia dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya dilingkungan itu belum dilaksanakan secara berkesinambungan
2. Penerapan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dilakukan secara optimal disebabkan kurangnya motivasi kinerja karyawan dan tujuan organisasi tidak tercapai secara maksimal
3. Penerapan pemberdayaan masyarakat belum dilakukan secara optimal disebabkan kurangnya evaluasi kinerja kelurahan didalam pemberdayaan masyarakat
4. Penerapan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum belum dilakukan secara optimal disebabkan kurangnya kelurahan dalam

melaksanakan tugasnya yang dilimpahkan oleh Walikota / Bupati melalui Camat.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini pembatasan sangat penting agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas. Membatasi masalah memiliki implikasi pada penyempitan teori dan variabel yang akan diteliti. Pembatasan masalah juga sangat membantu peneliti dalam merumuskan instrumen penelitian.

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis membatasi masalah tentang Evaluasi kinerja kelurahan dalam bidang kemasyarakatan di kelurahan Dwikora kecamatan medan helvetia tindakan kelas merumuskan masalah dan membatasi masalah menjadi bagian yang menentukan keberhasilan penelitian. Karena penelitian tindakan kelas merupakan bagian dari usaha melaksanakan perbaikan pelaksanaan tugas, maka masalah bersumber dari pelaksanaan tugas sehari-hari.

1.4. Perumusan Masalah

Menurut Hermawan Warsito (1992 : 22) Perumusan Masalah adalah proses selanjutnya dari penelitian setelah masalah penelitian dipahami, pemahaman tersebut kemudian dirumuskan secara operasional dan jelas batasnya guna untuk pelaksanaan penelitian.

Menurut James A. F. Stoner dan Charles Wankel (Sahat Simamora, 1993 : 219) permasalahan adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan kenyataan antara apa perlu dan apa tersedia antara harapan dan pencapaian.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan evaluasi kinerja kelurahan pada bidang sosial kemasyarakatan di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pelayanan pada bidang sosial kemasyarakatan di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut

- a. Untuk menganalisis evaluasi kinerja kelurahan pada bidang sosial kemasyarakatan di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia
- b. Untuk menganalisis tingkat pelayanan pada bidang sosial kemasyarakatan di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis adalah untuk meperluas ilmu pengetahuan penulis mengenai kajian perkembangan terhadap evaluasi kinerja kelurahan pada bidang sosial kemasyarakatan
- b. Secara praktis adalah untuk dapat memberikan masukan bagi kantor Kelurahan Dwikora kecamatan medan helvetia dalam mengevaluasi kinerja kelurahan pada bidang sosial kemasyarakatan.

- c. Secara Akademik, Untuk mencapai gelar kesarjanaan pada di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di universitas medan area.



BAB II

LANDASAN TEORI



2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Evaluasi

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris “*Evaluation*” yang berarti penilaian atau penafsiran (Jhon M. Echols, 1983). Evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu keputusan (Stufflebeam, 1971). Evaluasi adalah dasar untuk berkomunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai.

Bahwa didalam evaluasi merupakan proses yang sistematis mulai dari menentukan tujuan (*objektif*) sampai menentukan keputusan, dimana prosesnya diawali dengan menentukan sasaran yang akan dievaluasi, cara mengukur, mencatat data, menganalisis, menginterpretasikan hasil analisis, mengambil kesimpulan dan menetapkan keputusan.

Secara khusus evaluasi atau penilaian juga diartikan sebagai proses pemberian nilai berdasarkan data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan.

2.1.2. Pengertian Kinerja

Kata kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar “kerja” yang menterjemahkan kata dari bahasa Asing “prestasi” bisa pula berarti “hasil kerja”.

Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67) bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Malayu S.P. Hasibuan (2005 : 34) mengemukakan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan, seperti yang kita ketahui maju mundurnya suatu perusahaan terletak pada manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kinerja dari pada pekerja dipengaruhi oleh kompetensi individu yang bersangkutan dengan adanya dukungan dari perusahaan ataupun dukungan pihak manajemen. Kinerja sumber daya manusia merupakan istilah yang berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang).

2.1.3. Pengertian Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja disebut "*performance evaluation* (penilaian kinerja)" atau "*performance Appraisal* (penilaian prestasi)". Appraisal berasal dari kata inggris "*Aperatiare*" yang berarti memberikan nilai atau harga, dengan demikian evaluasi kinerja berarti memberi nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan untuk itu diberikan imbalan, kompensasi atau penghargaan.

Evaluasi kinerja atau penilaian prestasi karyawan adalah penilaian prestasi kerja (*performance appraisal*) yaitu suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Evaluasi kinerja terdiri atas beberapa tahapan yaitu :

1. Mengumpulkan dan menyeleksi informasi
2. Mendeskripsikan dan menginterpretasikan data
3. Mengembangkan dan mengkaji informasi
4. Menarik kesimpulan

Pada umumnya dalam kegiatan penilai, selalu dipengaruhi oleh sedikit banyaknya unsur subjektivitas. Bertindak dan berpikir secara objektif adalah sesuatu yang sulit untuk merealisirnya karena untuk menilai para karyawannya atau pegawainya dilakukan secara objektif. Pelaksanaan yang dilakukan atas pendekatan, dimana terdapat tumpuan atas menentukan gaji / upah berdasarkan jasa yang kemudian dikenal sebagai penentuan gaji / upah berdasarkan kinerja.

Evaluasi kinerja dalam pelaksanaan tugas dapat diukur dengan mengevaluasi yaitu :

1. Input

Adalah pengetahuan dan keahlian yang dipakai manajer untuk merencanakan materi pelatihan tersebut.

2. Proses

Adalah keefektifan keahlian pelatihan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pelatihan tersebut.

3. Output

Adalah kualitas pelatihan itu sendiri dari segi isinya, penyajiannya dan administrasinya.

4. Outcome

Adalah dampak yang ditimbulkan oleh pelatihan tersebut terhadap kinerja peserta pelatihan.

Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan penilaian pelaksanaan tugas seseorang atau kelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau satu organisasi sesuai dengan standart kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja.

2.1.4. Metode Evaluasi Kinerja

Jelas amatlah penting bagi kita untuk memantau pengenalan manajemen evaluasi kinerja secara hati-hati tetapi sama pentingnya untuk mengevaluasinya secara berkala. Metode evaluasi yang terbaik adalah dengan bertanya kepada mereka terlibat yaitu pimpinan, individu dan tim, bagaimana hal itu bekerja. Diskusi kelompok dan individu ditambah dengan suatu survey khusus tentang reaksi terhadap manajemen kinerja yang dapat dilakukan secara tepat oleh semua para pimpinan dan staff karyawan dan pegawai.

Ada berbagai teknik untuk mengevaluasi kinerja karyawan atau pegawai. Penilaian-penilaian ini seperti biasanya dilakukan oleh penyelidik atau atasan langsung. Metode-metode penilaian berguna untuk pengambilan keputusan

kenaikan upah, promosi dan berbagai bentuk penghargaan organisasional karena dapat menghasilkan ranking karyawan dari yang terbaik sampai yang terjelek.

T. Hani Handoko (1994 : 148) metode evaluasi dilakukan dengan cara :

1. Metode ranking

Metode ranking berarti menilai membandingkan karyawan antara yang satu dengan yang lain untuk menentukan siapa yang lebih baik dan kemudian menempatkan setiap karyawan dari urutan yang terbaik sampai yang terjelek.

2. Metode distribusi yang dipaksakan (*forced distributions*)

Pada metode ini penilaian memisah-misahkan atau menyortir para karyawan kedalam berbagai klasifikasi yang berbeda. Biasanya diletakkan pada setiap kategori. Kriteria yang ditunjukkan adalah untuk prestasi kerja keseluruhan.

3. Metode alokasi angka (*point allocation method*)

Penilaian diberikan sejumlah nilai total untuk dialokasikan diantara para karyawan dalam kelompok. Para karyawan yang lebih baik diberi nilai besar dari pada karyawan dengan prestasi lebih jelek.

2.1.5. Tujuan Evaluasi Kinerja

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran pada tujuan setiap instansi lembaga organisasi / perusahaan. Evaluasi kinerja organisasi / perusahaan dimaksudkan untuk mengetahui posisi dan tingkat pencapaian sasaran organisasi / perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi kelambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan dicapai. Hasil evaluasi kinerja organisasi / perusahaan juga digunakan untuk menyusun rencana kerja organisasi / perusahaan selanjutnya.

Oleh karena itu para pegawai / pekerja ingin penggajian yang mencerminkan nilai keadilan dibandingkan dengan pegawai lain dan berdasarkan sifat dasar dari kerjanya. ini memungkinkan mereka untuk menentukan kompensasi yang adil dan juga keunggulan komparatif dan keburukan dari perjanjian artinya mengejar pelayanan yang sama disektor pemerintah sekalipun itu dilaksanakan oleh pegawai-pegawai pemerintah.

Adapun tujuan evaluasi kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2006 :10) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan / pegawai tentang persyaratan kinerja
2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan / pegawai, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu
3. Memberikan peluang kepada karyawan / pegawai untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang
4. Mendefenisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan / pegawai termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya
5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khususnya rencana diklat dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah.

Surya Dharma (2005 : 125) dalam bukunya manajemen kinerja mengemukakan bahwa sasaran evaluasi kinerja adalah sebagai berikut :

1. Motivasi

Adalah orang untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan keahlian

2. Pengembangan

Adalah memberikan dasar untuk mengembangkan dan memperluas atribut dan kompetensi yang relevan atas peran mereka sekarang maupun peran dimasa depan terutama karyawan / pegawai yang memiliki potensi untuk melakukannya

3. Komunikasi

Adalah berfungsi sebagai saluran komunikasi dua arah tentang peran, sasaran, hubungan, masalah kerja dan aspirasi.

2.1.6. Faktor-faktor Evaluasi Kinerja

Tiga dimensi kinerja yang perlu dimasukkan dalam penilaian prestasi kerja adalah :

1. Tingkat kedisiplinan karyawan / pegawai sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi untuk menahan orang-orang didalam organisasi, yang dijabarkan dalam penilaian terhadap ketidak hadiran, keterlambatan dan lama waktu kerja
2. Tingkat kemampuan karyawan / pegawai sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi untuk memperoleh hasil penyelesaian tugas yang terandalkan, baik dari sisi kuantitas kinerja yang harus dicapai oleh seorang karyawan / pegawai
3. Perilaku-perilaku inovatif dan spontan diluar persyaratan-persyaratan tugas formal untuk meningkatkan efektivitas organisasi, antara lain dalam bentuk

kerja sama, pelatihan diri, serta sikap-sikap lain yang menguntungkan organisasi.

2.1.7. Sistem Evaluasi Kinerja yang Efektif

Sistem penilaian kinerja yang digunakan perusahaan tentunya tergantung pada sasaran yang ingin dicapai dan bentuk perusahaan yang ingin dihadapi. Data perlu diolah lebih lanjut dan hasil pengolahan itulah yang disebut informasi, artinya data adalah input, sedangkan informasi adalah output. Dengan pengolahan yang matang dan bentuknya menjadi informasi dan informasi itulah yang disalurkan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan.

Agar informasi yang dihasil sungguh-sungguh bermanfaat bagi Top Management dalam mengambil keputusan, penanganan yang teliti dan matang berarti :

1. Tidak melupakan bahwa sistem informasi yang dikembangkan dimaksudkan untuk mempermudah tercapainya tujuan
2. Sistem informasi yang dikembangkan dimaksudkan untuk mempertinggi maupun organisasi mengemban misinya
3. Memperhatikan bahwa informasi akan digunakan untuk mengambil keputusan
4. Menentukan kebutuhan akan informasi
5. Mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang didapat
6. Penanganan informasi yang terdiri dari langkah-langkah :
 - a. Pengumpulan data
 - b. Klasifikasi data menurut sumber dan sifatnya

- c. Pengolahan data
- d. Analisis data
- e. Interpretasi data
- f. Penyimpanan informasi hingga waktunya digunakan

Black James Menzies (Mohammad Masud, 1998 : 220) menguraikan bahwa untuk menciptakan suatu sistem penilaian kinerja yang baik ada delapan hal yang perlu diperhatikan sebagai metode penilaian :

1. Penilaian menyeluruh (*global rating evaluation*)
2. Penilaian yang berdasarkan pada perbandingan (*man to man comparison*)
3. Penilaian yang menggunakan daftar periksa (*checklist evaluation*)
4. Penilaian langsung kelapangan
5. Penilaian berdasarkan perilaku (*attitude evaluation*)
6. Penilaian berdasarkan insiden kritis
7. Penilaian berdasarkan keefektifan (*effectiveness based evaluation*)
8. Penilaian berdasarkan pembawaan (*trait based evaluation*)

Pelatihan manajemen memiliki karakteristik tersendiri. Penilaian diarahkan untuk mengontrol ketercapaian tujuan kurikulum bidang studi tersebut dan taraf penguasaan materi pelajaran oleh para peserta. Dengan penilaian dapat diketahui efisiensi kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan dan media pembelajaran yang digunakan oleh pelatih.

2.1.8. Pengertian Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten /Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota. Kelurahan dibentuk diwilayah kecamatan (Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan)

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota yang berkedudukan diwilayah kecamatan, dan kelurahan sebagai sub sistem Kabupaten /Kota yang merupakan pelaksana pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang paling dekat dengan rakyat.

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 pasal 3 ayat (1) tentang kedudukan dan tugas, yaitu kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten / kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan dan Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Kelurahan dipimpin oleh lurah didampingi oleh perangkat kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati / Walikota dan didalam Peraturan pemerintah No.73 Tahun 2005 pasal 5 ayat (1) tentang perubahan status desa yang dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD, dan Lurah mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat

4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Dalam hal pelimpahan tugas dari Bupati / walikota kepada Lurah, maka pemerintah Kabupaten /Kota perlu memverifikasi tugas-tugas yang dilimpahkan secara proposional. Pelaksanaan tugas lurah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan tuntutan kebutuhan masyarakat kota. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pemerintahan kelurahan. Guna menjamin penyelenggaraan pemerintah kelurahan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku maka pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten / Kota dan Camat melakukan pengawasan. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 2005 Pasal 22 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

1. Mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan
2. Maksud dan tujuan

3. Tugas fungsi dan kewajiban
4. Kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bakti pengurus, hak dan kewajiban.
5. Keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban
6. Tata kerja dan
7. Sumber dana.

Peraturan pemerintah No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tentang kedudukan dan tugas, Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati / Walikota yaitu :

1. Urusan pemerintah antara lain adalah pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada lurah.
2. Urusan Pembangunan antara lain adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.
3. Urusan kemasyarakatan antara lain adalah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Susunan Organisasi Kelurahan Terdapat Dalam Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 Pasal 6 Adalah :

1. Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat daerah

2. Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang susunan organisasi, terdiri dari sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.

Seksi Struktur Organisasi Kelurahan Terdiri Dari :

- Lurah
 - Sekretaris Kelurahan
 - Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum
 - Seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan
 - Seksi kesejahteraan masyarakat
3. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tentang susunan organisasi, bertanggung jawab kepada Lurah
 4. Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tentang susunan organisasi, diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota atas usul Camat
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Alokasi anggaran keuangan Kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten / Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya, Bantuan Pemerintah, Bantuan Provinsi, Bantuan Kabupaten / Kota dan Sumber-sumber lainnya. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur dengan baik dan hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah merupakan salah satu alat perencanaan mengenai pengeluaran

dan penerimaan (pendapatan) dimasa yang akan datang, misalnya disusun untuk satu tahun.

Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan pemerintah No. 73 tahun 2005 pasal 14 tentang kegiatan adalah Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan yaitu :

1. Peningkatan pelayanan masyarakat
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
3. Pengembangan kemitraan
4. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup
5. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif adalah penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pembangunan tindak lanjut hasil pembangunan dilakukan secara partisipatif. Dalam pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.

2.1.9. Proses Evaluasi Kinerja Kelurahan

Proses pelaksanaan evaluasi kinerja keluarahan adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standart kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Tujuan evaluasi kinerja adalah

untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan atau organisasi dan juga mengetahui posisi perusahaan dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki, supaya sasaran atau tujuan tercapai. Hasil evaluasi kinerja dapat dimanfaatkan untuk banyak pengguna, baik bagi meningkatkan prestasi kinerja.

Evaluasi kinerja kelurahan dalam meningkatkan tugas pokok dan fungsinya terdapat dalam Pasal 7 (tujuh) tentang tata kerja yaitu bahwa lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Setiap pemimpin satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

Pelaksanaan Evaluasi kinerja kelurahan ini bertujuan tercapainya keserasian antara kebijaksanaan desa atau kelurahan dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa. Dalam kelurahan perlu dilakukan pembangunan partisipatif yaitu fasilitas perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pembangunan tindak lanjut pembangunan partisipatif

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan hasil pemikiran yang bersifat kritis dalam memperkirakan hasil penelitian yang akan dicapai (Nawawi, 1989 : 40)

Kuncoro (2003 :263) menyatakan bahwa kerangka pemikiran terdiri dari variabel-variabel dan hubungan-hubungan yang membentuk contest kausal dari penelitiannya, karena itu harus ada riset manapun.

2.3. Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan judul penelitian dan konsep hipotesis diatas, maka penulis megemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. **Evaluasi** merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktifitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya
2. **Kinerja** dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah
3. **Kelurahan** adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. **Masyarakat** juga sering dikenal dengan istilah *society* yang berarti sekumpulan orang yang membentuk sistem, yang terjadi komunikasi didalam kelompok tersebut. Masyarakat bisa diartikan sekelompok orang

yang saling berhubungan dan kemudian membentuk kelompok yang lebih besar. Biasanya masyarakat sering diartikan sekelompok orang yang hidup dalam satu wilayah dan hidup teratur oleh adat didalamnya.





BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1.1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus (Arikunto, 2006 : 130)

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tersebar di 12 lingkungan Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia terdiri dari 4.278 kepala keluarga atau 18.790 jiwa. Distribusi penduduk di tiap-tiap lingkungan ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Populasi Jumlah Penduduk Di Setiap Lingkungan Kelurahan
Dwikora Kecamatan Medan Helvetia

No	Nama Lingkungan	Jumlah Penduduk (KK)
1.	Lingkungan 1	510
2.	Lingkungan 2	425
3.	Lingkungan 3	470
4.	Lingkungan 4	212
5.	Lingkungan 5	495
6.	Lingkungan 6	275
7.	Lingkungan 7	325
8.	Lingkungan 8	326
9.	Lingkungan 9	408
10.	Lingkungan 10	190
11.	Lingkungan 11	317
12.	Lingkungan 12	325
Jumlah		4.278

Sumber : Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, 2014

Penelitian ini bukan merupakan penelitian populasi, melainkan penelitian sampel, pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak (*radom sampling*), yaitu sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Menurut Bungin (2005 : 105) menentukan jumlah sampel dengan Rumus Taro Yamane :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

D : Presisi / tingkat kesalahan penarikan sampel = 10 % dengan tingkat kepercayaan = 90 %

Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang dianggap mewakili seluruh populasi penelitian, dihitung sebagai berikut :

$$n = \frac{4278}{4278 (0.01)^2 + 1}$$

$$n = \frac{4278}{42,78 + 1}$$

$$n = \frac{4278}{43,78}$$

$n = 97,71$ dibulatkan menjadi 98

Tabel 2 menunjukkan bahwa populasi penelitian ini merupakan populasi berstrata. Agar pengambilan sampel proposional dengan jumlah penduduk

dimasing-masing populasi, maka pengambilan sampel juga dilakukan secara Strata (Surachman 1999 : 200).

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan :

n_i : Jumlah sampel setiap strata populasi

N_i : Jumlah populasi setiap strata

N : Jumlah populasi keseluruhan

n : Jumlah sampel keseluruhan

Berdasarkan rumus diatas, maka jumlah sampel untuk tiap-tiap strata populasi dapat dihitung sebagai berikut :

1. Lingkungan 1

$$n_1 = \frac{510}{4278} \times 98 = 11,68 \text{ (dibulatkan menjadi 12)}$$

2. Lingkungan 2

$$n_2 = \frac{425}{4278} \times 98 = 9,73 \text{ (dibulatkan menjadi 10)}$$

3. Lingkungan 3

$$n_3 = \frac{470}{4278} \times 98 = 10,76 \text{ (dibulatkan menjadi 11)}$$

4. Lingkungan 4

$$n_4 = \frac{212}{4278} \times 98 = 4,85 \text{ (dibulatkan menjadi 5)}$$

5. Lingkungan 5

$$n_5 = \frac{498}{4278} \times 98 = 11,3 \text{ (dibulatkan menjadi 11)}$$

6. Lingkungan 6

$$n_6 = \frac{275}{4278} \times 98 = 6,29 \text{ (dibulatkan menjadi 7)}$$

7. Lingkungan 7

$$n_7 = \frac{325}{4278} \times 98 = 7,44 \text{ (dibulatkan menjadi 8)}$$

8. Lingkungan 8

$$n_8 = \frac{326}{4278} \times 98 = 7,39 \text{ (dibulatkan menjadi 7)}$$

9. Lingkungan 9

$$n_9 = \frac{408}{4278} \times 98 = 9,34 \text{ (dibulatkan menjadi 9)}$$

10. Lingkungan 10

$$n_{10} = \frac{190}{4278} \times 98 = 4,35 \text{ (dibulatkan menjadi 4)}$$

11. Lingkungan 11

$$n_{11} = \frac{317}{4278} \times 98 = 7,26 \text{ (dibulatkan menjadi 7)}$$

12. Lingkungan 12

$$n_{12} = \frac{325}{4278} \times 98 = 7,44 \text{ (dibulatkan menjadi 7)}$$

Untuk lebih jelasnya, distribusi sampel untuk masing-masing populasi ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Sampel Jumlah penduduk Di Setiap Lingkungan Kelurahan Dwikora
Kecamatan Medan Helvetia

No	Nama Lingkungan	Jumlah Penduduk (KK)
1.	Lingkungan 1	12
2.	Lingkungan 2	10
3.	Lingkungan 3	11
4.	Lingkungan 4	5
5.	Lingkungan 5	11
6.	Lingkungan 6	7
7.	Lingkungan 7	8
8.	Lingkungan 8	7
9.	Lingkungan 9	9
10.	Lingkungan 10	4
11.	Lingkungan 11	7
12.	Lingkungan 12	7
Jumlah		98

Sumber : Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia 2014

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui :

1. Data primer adalah secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti baik perorangan maupun organisasi.
 - a. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat/direkam
 - b. Observasi, pengamatan melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, perasa). Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik

- c. Wawancara, pengambilan data melalui wawancara /secara lisan langsung dengan sumberdatanya, baik melalui tatap muka atau lewat telephone, teleconference. Jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti.
 - d. Dokumen, pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga / institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.
2. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Contohnya adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah. Data yang diperoleh dari sumber kedua, dokumentasi lembaga
- a. Biro Pusat Statistik (BPS)
 - b. Rumah sakit
 - c. Lembaga atau institusi

3.3. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional pada dasarnya adalah bagaimana caranya untuk mengukur variabel sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang melekat dalam suatu variabel untuk mendukung analisa variabel tersebut,

Dalam penelitian ini defenisi operasionalnya adalah :

1. Evaluasi Kinerja Kelurahan Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 Adapun tugas dan tanggung jawab Lurah kepada masyarakat yang dilimpahkan oleh Bupati/walikota yaitu :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan adalah strategi Kelurahan Dwikora didalamnya menyikapi pelaksanaan kegiatan pemerintah antara daerah, antara sektor dan antar manusia didaerah atau dilingkungan baik didalam melaksanakan kegiatan sosial ekonominya.
 - b. Lurah memberikan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kreasi daerah atau lingkungan dengan cara memberdayakan masyarakat serta manfaat keragaman budaya sebagai aset pembangunan nasional di Kelurahan Dwikora
 - c. Lurah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu keperluan pengurusan administrasi seperti pengurusan Kartu Keluarga, KTP, Surat warisan tanah, dan Administrasi lainnya. Kelurahan Dwikora berkewajiban menetapkan standart pelayanan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
 - d. Lurah menyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Kelurahan Dwikora saling menjaga ketentraman dan ketertiban umum didaerah atau dilingkungan masing-masing serta membuat Pos Siskamling untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
 - e. Lurah memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum Kelurahan Dwikora memberikan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum dengan baik, didalam pengurusan adminitrasi masyarakat

f. Lurah membina lembaga kemasyarakatan Kelurahan Dwikora yang bertugas memberikan lembaga kemasyarakatan kepada masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

2. Karakteristik responden. dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Usia / Umur adalah berpengaruh terhadap volume dan efektivitas kerja seseorang
- b. Jenis Kelamin adalah sangat berpengaruh terhadap banyaknya jumlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga mudah untuk dihitung mana yang paling banyak jumlahnya dan mana yang paling sedikit jumlah jenis kelaminnya
- c. Tingkat Pendidikan adalah sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja seseorang
- d. Pekerjaan / Jabatan adalah berpengaruh terhadap tanggung jawab akan pekerjaan yang dilakukan
- e. Masa Kerja adalah berpengaruh kepada pengalaman dan pemahaman seseorang terhadap organisasi dan tujuannya

3.4. Analisis Data

1. Pengertian Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian, teknik analisis

data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik).

2. Tujuan Analisis Data

- a. Mendeskripsikan data, biasanya dalam bentuk frekuensi, ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispersi, sehingga dapat dipahami karakteristik datanya. Dalam statistika, kegiatan mendeskripsikan data ini dibahas pada statistika deskriptif.
- b. Membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi, atau karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik). Kesimpulan yang diambil ini biasanya dibuat berdasarkan pendugaan (estimasi) dan pengujian hipotesis. Dalam statistika, kegiatan membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi atau sampel ini dibahas pada statistika inferensial.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Evaluasi kinerja kelurahan pada bidang sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia selama ini telah melaksanakan tugas lurah semaksimal mungkin untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, pada bidang sosial kemasyarakatan baik dilihat dari sumber penghasilan dan kualitas pendidikan
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan evaluasi kinerja kelurahan pada bidang sosial kemasyarakatan di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia selama ini sangat baik. Hal ini terlihat dari seringnya masyarakat mengalami peningkatan dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan sosial dapat diamati dengan tingkat kehidupan, pemenuhan kebutuhan pokok, kualitas hidup, pembangunan manusia. Bahwa dengan mengevaluasi kinerja kelurahan pada bidang sosial kemasyarakatan dapat mensejahterakan masyarakat didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia dan menganalisis hasil dari penelitian, adapun saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Agar evaluasi kinerja kelurahan pada bidang sosial kemasyarakatan di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia yang selama ini telah terbina dengan baik terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi khususnya bidang sosial mensejahterakan kemasyarakatan.
2. Agar Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia lebih memperhatikan tingkat kehidupan, pemenuhan kebutuhan pokok, kualitas hidup dan pembangunan manusia, sehingga lebih mempererat hubungan antara Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia dengan kemasyarakatannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharmisi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta Penerbit Rineka Cipta,
- Ahmadi, 1991, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksar
- Bungin, M Burhan, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta Penerbit Perdana Media.
- Dharma, Surya, 2005, *Manajeen Kinerja*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Gomes, Faustino Cardoso, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, yogyakarta, Andi Offset.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta Bumi Aksara Edisi Revisi.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Mangkunegara, Prabu A. Anwar, 2006, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Bandung Cetakan Kedua, PT. Revika Aditama.
- Nawawi Hadari, 2001, *Metode Sosial Bidang Sosial*, Yogyakarta Penerbit Gadjahmada University Press.
- Sen Amartya, 2002, *Inequality Reexamined*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- Soekonto, Soejono, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar Jakarta*, Cetakan Pertama, Penerbit CV Rajawali.
- Undan-Undang No.73 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pemerintah Kelurahan*, 2006, Bandung Penerbit Fokus Media.
- Stoner A.F. dan Wankel Charles, 1993 diterjemahkan oleh Sahat Simamora, *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan*, Jakarta Cetakan Pertama, Penerbit PT. Rineka Cipta.